



Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Manajemen Penanganan Sampah Di Kota Ambon

Sofpia Tuhumury^{1*}, Samson Laurens¹, Wahab Tuanaya¹

¹ Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author email: sofpiatuhumury@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2024
Approved June 17, 2024

Keywords:

Policy, Government, Handling, Waste.

ABSTRACT

This research was carried out in Ambon City at the Environment and Waste Service as well as several environmental and waste care communities/institutions in Ambon City. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the process of implementing government policies in waste management in Ambon City. The results of this research describe that the government's role in handling waste has not been effective, this is due to the lack of infrastructure which is inadequate to handle the increasing volume of waste in Ambon City and the lack of public awareness about the importance of good waste handling so that it is free from negative environmental impacts and this which is one of the inhibiting factors in the process of implementing government policies.

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan serta beberapa Komunitas/lembaga Peduli Lingkungan dan sampah yang ada di Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam proses Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Manajemen Penanganan Sampah Di Kota Ambon. Hasil Penelitian ini mendeskripsikan bahwa peran pemerintah dalam penanganan sampah belum efektif, hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang tidak cukup untuk menangani volume sampah yang terus meningkat di Kota Ambon dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan sampah yang baik agar terlepas dari dampak negatif lingkungan dan ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penerapan kebijakan pemerintah.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Penanganan Sampah di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1704–1717. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2690>.

PENDAHULUAN

Masalah sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh Negara di dunia, tanpa terkecuali karena hal ini berkaitan dengan semakin tingginya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya. Masalah sampah yang terjadi di berbagai negara di dunia tentu saja memiliki penyebab masing-masing. Salah satu dari sekian banyak penyebab masalah sampah yakni produksi barang konsumsi yang terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang semakin konsumneris. Barang-barang konsumsi tersebut pada akhirnya akan menjadi sampah dan semakin menambah jumlah sampah yang harus ditangani oleh Pemerintah. Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang serius karena dapat merusak estetika kota, menciptakan bau tak sedap, menimbulkan penyakit, dan dapat membahayakan makhluk hidup jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik dan teratur, mulai dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah hingga pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan sampah yang aman dan ramah lingkungan. Sampah merupakan material sisa atau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan lingkungan sekitarnya, seperti perkantoran, rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan sebagainya sisa yang sudah tidak diperlukan atau dianggap tidak bernilai lagi dan biasanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sampah dapat berupa bahan organik atau anorganik, seperti sisa makanan, plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Persoalan sampah di Kota Ambon menjadi masalah yang serius, terbukti tumpukan sampah masih ada di seluruh sudut kota Ambon dan sulit untuk diselesaikan.

Ada beberapa masalah yang terkait dengan sampah pada umumnya yakni Kepadatan dan jumlah sampah yang semakin besar. Masalah utama dengan sampah adalah jumlahnya. Populasi manusia terus meningkat, dan dengan itu, jumlah dan kepadatan sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia tetapi juga lingkungan, dari sisi lain ada juga Disposasi yang tidak menyenangkan yakni Sampah yang tidak efektif dalam pembuangan dapat menyebabkan dampak yang sangat tidak menyenangkan, seperti bau busuk dan penyebaran penyakit. Sampah yang digali di bawah tanah di tempat pembuangan sampah umum, bisa melepaskan gas beracun ke udara serta bisa merusak lingkungan. Ketergantungan pada limbah yakni banyak negara masih tergantung pada pembuangan sampah, yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Praktek-praktek sederhana seperti pemilahan sampah dan daur ulang dapat mengurangi penumpukan sampah pada tempat penampungan sampah umum. masalah lainnya tentang sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan padahal lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintah harus menempuh berbagai cara untuk membangkitkan kesadaran lingkungan sehingga orang-orang lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ada juga kurangnya alat dan teknologi yang membantu dalam pengurangan sampah dan pemrosesan yang ramah lingkungan, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah sampah. Diperlukan dukungan pemerintah maupun instansi swasta dalam upaya pengelolaan sampah. Kekurangan sumber daya baik manusia maupun finansial, bisa memperlambat upaya pengelolaan sampah.

Banyak produk konsumen modern terbuat dari bahan non- biodegradable, seperti plastik, yang sulit terurai dalam lingkungan. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah yang semakin meningkat dengan volume sampah yang meningkat secara drastis. Dalam beberapa tahun

terakhir, volume sampah rumah tangga di kota-kota besar meningkat dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang semakin konsumtif dan kurang disiplin dalam mengelola sampah terkhusus sampah yang sulit diuraikan mengakibatkan sampah sering dibuang sembarangan, bahkan di tempat yang seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Selain dampak lingkungan dan kesehatan ada juga dampak sosial ekonomi yakni masalah sampah juga dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan, seperti meluasnya tempat pembuangan sampah, pencemaran air dan tanah, serta kesulitan warga sekitar untuk ada dalam transaksi jual beli mereka arena situasinya yang cenderung tidak nyaman dan tidak sehat. Masalah sampah akan terus menerus mengkhawatirkan lingkungan karena kondisi lingkungan yang semakin buruk secara global adalah bukti nyata akan masalah sampah. Sekitar 2,01 miliar ton sampah dihasilkan oleh seluruh penduduk di seluruh dunia setiap tahunnya dan Angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Pengelolaan sampah seharusnya sudah makin membaik demi mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengacu kepada Undang- undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sistem regulasi persampahan ini terus dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menyatakan bahwa penghasil sampah wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber sehingga kegiatan ini akan melibatkan aspek non teknis yaitu peran serta masyarakat. Ada juga Permen PU No. 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan, Tempat Pengolahan Sampah berbasis 3R (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Dengan konsep ini sampah yang dikenal sebagai bahan sisa yang tidak berguna dapat diubah menjadi bahan yang bernilai dan bermanfaat (Damanhuri & Padmi, 2010). Dalam rangka mendukung kebijakan nasional juga mengenai pengurangan dan penanganan sampah maka Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Meskipun telah memiliki peraturan tentang pengelolaan sampah namun belum diterapkan secara maksimal di Kota Ambon Proyeksikan meningkatnya jumlah sampah akan mencapai 3,4 miliar ton di tahun 2050 jika tidak ditangani dengan baik, Sampah berdampak pada kesehatan manusia, terutama sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah berdampak juga pada penurunan kualitas lingkungan dan merusak ekosistem.

Untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mempromosikan pengurangan penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai, menyediakan fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan sampah yang aman dan efisien, dan juga melibatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat merubah perilaku mereka dalam mengolah dan membuang sampah dengan lebih bijak. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti kantong plastik, gelas plastik, dan botol air. Selain itu, masyarakat juga dapat memilah sampah yang dihasilkan, seperti kertas, plastik, logam, dan bahan organik. Sampah yang bisa didaur ulang dapat disalurkan ke tempat pengolahan sampah daur ulang, sedangkan sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Jika upaya pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan terarah, maka akan mengurangi dampak negatif lingkungan dan membuat lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk sadar akan pentingnya sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab dalam menjaga

lingkungan di sekitar kita. Namun dalam upaya kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat umum tapi juga pengusaha swasta untuk mengatasi masalah sampah ini.

Kota Ambon, seperti kota-kota lain di Indonesia, juga mengalami masalah serius terkait dengan sampah. Dengan populasi yang semakin meningkat maka konsumsi dan produksi juga meningkat, yang mengakibatkan peningkatan volume sampah. Sampah di kota Ambon terkumpul di tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Passo. Namun, TPA tersebut sudah melebihi kapasitasnya dan sering terjadi penuh dalam waktu singkat. Langkah-langkah seperti mendaur ulang sampah, membuat industri daur ulang, program pengurangan sampah, dan memperkenalkan sistem pembuangan sampah yang lebih efisien, harus diimplementasikan lebih baik lagi untuk mengurangi dampak negatif dari masalah sampah di kota Ambon. Efektifnya kampanye sadar lingkungan dan pembiasaan hidup yang berkelanjutan akan sangat membantu untuk memperbaiki masalah sampah di kota Ambon.

Sampah di kota Ambon didominasi oleh sampah organik dan sampah plastik yang tidak terurai dengan mudah oleh karenanya Penanganan sampah yang kurang efektif menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan kesehatan, bahkan dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Kota Ambon. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Ambon telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan dalam manajemen pengelolaan sampah yakni Salah satu kebijakan tersebut adalah penataan ulang sistem pengumpulan dan pembuangan sampah dengan mengutamakan pembuatan tempat pembuangan akhir yang modern dan sesuai standar. Pemerintah Kota Ambon juga memberikan perhatian lebih pada gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan mengadakan program program kreatif seperti pembuatan bank sampah, peningkatan kualitas pengolahan sampah menjadi pupuk dan biogas, serta memaksimalkan sistem pengelolaan sampah dengan membagikan sampah organik kepada peternak ternak dan sampah non- organik untuk dijual ke pengepul.

Ada beberapa fakta terkait masalah sampah di Kota Ambon yakni volume sampah yang tinggi. Setiap hari, Kota Ambon menghasilkan sekitar 230-300 ton sampah. Volume ini meningkat pesat karena pertumbuhan populasi dan aktivitas konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Sayangnya, sampah yang dihasilkan jauh melampaui kapasitas pengolahan sampah yang tersedia di kota Ambon tersebut dan juga kurangnya sarana pengolahan sampah, Kota Ambon masih mengandalkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang sudah makin overload dan tidak memenuhi standar sanitasi dan lingkungan. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah menyebar dan berisiko dan masalah sampah menjadi salah satu hal yang sekarang di tempuh oleh pemerintah kota Ambon dalam hal pengelolaan sampah yakni proses penyempitan sampah yang terlihat kontroversi yakni pembongkaran pada sebagian besar tempat-tempat sampah di pinggiran jalan seperti yang terjadi pada desa Poka dan juga pada wilayah lain yang ada di pinggiran jalan yang di lakukan oleh pemerintah kota dalam penutupan tempat pembuangan sementara sampah dari pemerintah sehingga masyarakat pada wilayah tertentu hanya terdapat sejumlah titik yang bisa digunakan masyarakat untuk membuang sampah sementara tetapi ini sangat beresiko karena pemukiman penduduk yang jauh dari titik pembuangan sampah sementara akan berimplikasi pada terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan di sisi lain pemerintah kota tidak mampu memberdayakan aparatur pada level terbawah misalnya pada tingkat kelurahan, tingkat desa untuk memerangi masalah sampah harusnya timbul kesadaran dan partisipasi aktif serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat sangatlah penting. Dengan upaya bersama,

masalah sampah di kota Ambon dapat diatasi dan kota Ambon dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan sehat bagi warganya karena sampah menjadi isu masalah lingkungan yang semakin mendesak untuk segera diatasi. Pemerintah Kota harusnya lebih solutif dalam membuat dan menerapkan regulasi kebijakan contohnya Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan, Melalui pendidikan dan kesadaran lingkungan, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya suatu daerah untuk dijaga kebersihannya.

Masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Menggandeng Swasta dan LSM: Pemkot Ambon bekerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sampah. Kolaborasi ini juga mencakup pengadaan alat dan infrastruktur pengelolaan sampah. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemkot Ambon juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan cara penanganan sampah yang benar. Melakukan Pemilahan Sampah: Pemkot Ambon juga mendorong warganya untuk memilah sampah menjadi organik dan non-organik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan dan daur ulang sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Mendorong Penggunaan Alternatif Ramah Lingkungan: Pemkot Ambon mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kantong belanja kain atau tas jinjing sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Menggunakan sistem pengumpulan sampah teratur: Pemkot Ambon telah mengadopsi sistem pengumpulan sampah teratur yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Sampah diambil secara berkala dari rumah penduduk untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk komunitas atau kelompok yang mendaur ulang sampah di kota Ambon adalah pemberian dana atau subsidi. Pemerintah dapat memberikan dana atau subsidi kepada kelompok tersebut untuk membantu dalam pengadaan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam proses daur ulang sampah. Dana ini bisa digunakan untuk membeli mesin daur ulang, tempat penyimpanan, atau bahkan untuk pelatihan bagi anggota kelompok dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau kebijakan pajak tertentu kepada kelompok yang mendaur ulang sampah. Misalnya, pemerintah bisa memberikan pemotongan pajak atau keringanan pajak kepada kelompok yang mampu mengelola sampah dengan baik dan efisien. Selain dana dan insentif pajak, pemerintah juga dapat memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok daur ulang sampah. Pemerintah dapat membantu dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan limbah serta memberikan pendampingan teknis dalam proses daur ulang sampah. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pengakuan dan dukungan publik kepada komunitas atau kelompok yang mendaur ulang sampah. Pemerintah dapat secara aktif mempromosikan kegiatan daur ulang sampah ini melalui media sosial, pemberitaan, atau program-program kampanye. Dukungan publik ini dapat memotivasi komunitas atau kelompok tersebut untuk terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang dalam menjalankan praktik daur ulang sampah yang ada di Kota Ambon.

Kebijakan lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah menciptakan regulasi yang mengatur dan mendorong pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah dapat menerapkan aturan yang memberikan insentif atau sanksi bagi warga atau perusahaan dalam pengelolaan sampah. Misalnya, pemerintah bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaur ulang sampah atau memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan praktik pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan

komunitas atau kelompok yang mendaur ulang sampah di kota Ambon dapat lebih diperhatikan dan didukung dalam menjalankan kegiatannya. Ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam mendaur ulang sampah dan membantu mengurangi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh jumlah sampah yang meningkat. Teknologi Pengolahan Sampah yang baik juga perlu dipakai sehingga dapat menghasilkan energi dan menjadi sumber pengembangan ekonomi tanpa merusak lingkungan sesuai dengan konsep terang di malam hari dan bersih di siang hari. Teknologi pengolahan sampah ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengubah sampah menjadi sumber daya terbarukan dan juga sanksi Hukum dan Sosial yakni perlu diterapkan jika masyarakat melanggar aturan yang berlaku.

Umumnya masyarakat sudah mengetahui dan memahami penanganan sampah, pemilahan dan pemanfaatan jenis sampah organik dan anorganik dengan cukup baik namun penerapannya belum optimal. Penerapan belum optimal terjadi pada penanganan sampah disumbernya karena kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sarana dan prasarana pewadahan dan sumber daya manusia yang disediakan oleh pemerintah (Sobar Gandar Permana, 2020). Meskipun demikian, pengelolaan sampah di Kota Ambon masih belum sepenuhnya efektif yang berimplikasi pada kontroversi kebijakan pemerintah Kota Ambon. Sistem pengumpulan dan pembuangan sampah masih perlu ditingkatkan, fasilitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih terbatas, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon perlu terus meningkatkan upaya dan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya secara langsung akan meningkatkan kesehatan dan lingkungan hidup, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kota Ambon secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh fenomena sosial yang di maksud dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tesis ini dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Manajemen Penangan Sampah Di Kota Ambon ”.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menguraikan dan mendeskripsikan lebih mendalam dan detail tentang penerapan kebijakan pemerintah kota dalam manajemen penangan sampah di Kota Ambon. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data selanjutnya dibantu dengan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemerintah kota dalam manajemen penangan sampah di Kota Ambon. kebijakan dilakukan oleh pemerintah kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor. Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa aspek yang menjadi fokus yaitu, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pemrosesan sampah, hingga disposisi sampah. Objek penelitian pada penelitian ini fokus pada penerapan kebijakan pemerintah kota dalam manajemen penangan sampah di Kota Ambon. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah kota dalam manajemen penangan sampah di Kota Ambon dan sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah kota Ambon.

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci adalah Dinas terkait yakni Dinas lingkungan hidup, dan seterusnya akan dilakukan wawancara dengan 4 komunitas yakni komunitas The Mulung, Komunitas Bank Sampah, PT Milion Limbah Ambon, Green Moluccas dan juga masyarakat yang ada di Kota Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan dalam Penanganan sampah di Kota Ambon

Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Ambon merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kota Ambon, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki permasalahan yang kompleks terkait penanganan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, keindahan lingkungan, dan pencemaran sumber daya alam. Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, serta mengedepankan prinsip-prinsip daur ulang, daur baur, serta pengurangan sampah secara bertahap. Kota Ambon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki masalah serius dalam penanganan sampah. Sampah yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang efektif dalam penanganan sampah di Kota Ambon. Temuan penelitian Senen (2023), kedisipinan kualitas pelayanan (Senen, 2023), mengoptimalkan teknologi (Attamimi, dkk, 2024), akuntabilitas pelayanan (Herizal, dkk, 2020), pemanfaatan teknologi (Ekram, 2022), Kerjasama dan kolaborasi (Salman, dkk, 2023).

Untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah kota terkait masalah sampah maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut: wawancara penelitian dengan ibu N.R dan ibu M.S dan Bpk J. S.:

“Salah satu kebijakan prioritas Walikota Ambon pada poin 4 itu yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas lingkungan, serta pengembangan dan peningkatan pengelolaan pariwisata. Kalau pemerintah kota Ambon dan dinas Lingkungan hidup ada 7 isu kebijakan strategis yang dikembangkan di dalam penanganan sampah. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain adalah pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang modern, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta pengadaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah umum dan pengolahan sampah organik. Namun, masih ada beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah di Kota Ambon. Masalahnya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, serta masalah dalam penjadwalan dan pengelolaan anggaran untuk penanganan sampah dan Topografi yang berbukit yang membuat sarana prasarana terganggu dan DLHP punya kewenangan hanya darat kalau laut ditanggulangi oleh provinsi tapi provinsi tidak ada alat DLHP kota saja yang memiliki alat dan DLHP tetap punya tanggung jawab di teluk karena waktu zaman pemerintahan Walikota sebelumnya beliau sangat care ke teluk otomatis mau dan tidak mau DLHP yang harus tanggani karena DLHP punya 4 spit sampah, Provinsi tidak ada apa-apa, Provinsi hanya bisa mengedukasi masyarakat”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Salah satu langkah awal Implementasi kebijakan yang dilakukan juga adalah pembentukan tim penanganan sampah yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, pelaku industri, dan masyarakat contohnya Pabrik daur ulang sampah yang diresmikan oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, pada Mei 2023. Pemerintah Kota Ambon juga melakukan peningkatan infrastruktur penanganan sampah. Hal ini termasuk pembangunan tempat penampungan sampah yang layak, fasilitas daur ulang, dan pengadaan kendaraan pengangkut sampah yang canggih dan ramah lingkungan. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut : wawancara penelitian dengan ibu N.R dan Bpk R.S:

“Implementasinya kita harus sosialisasikan sekarang, yang baru jalan ini termasuk PAD November ini ada sosialisasi bersama anggota dewan. Yang lama sudah di sosialisasikan tetapi ada masalah contohnya kita tidak bisa menerapkan ketentuan pidana 3 bulan untuk orang yang buang sampah dan harus bayar 50 juta sangat tidak masuk akal, kita sudah terapkan terkait dengan pengelolaan, penyediaan sarana prasarana cuma masalahnya ketika kita tangkap orang yang buang sampah yang harus bayar 50 juta orang akan ribut dengan kita, mau terapkan itu tapi tidak masuk akal tentang bakar sampah dan buang sampah, kita pernah penerapan itu dengan POLPP, POLPP jaga dan sampah harus dibuang batas jam 5 semua jalan tanyakan kita tidak lalu saksi seperti itu di tempat”.

Fenomena kebijakan yang telah dilakukan oleh DLHP namun masih kurang efektif untuk menerapkan pidana bagi masyarakat yang melanggar aturan yang ada. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

Peran Pemerintah, Masyarakat dan Komunitas Kota Ambon

1. Peran Pemerintah

Pemerintah Kota Ambon memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan sampah di kota ini. Dengan langkah-langkah proaktif dan inisiatif yang mereka lakukan, penanganan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dengan carapemerintah dapat memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah. Ini termasuk membangun dan memperbaiki tempat pembuangan akhir yang memenuhi standar lingkungan, serta memperluas jaringan sistem pembuangan sampah di seluruh kota. Dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa sampah dikumpulkan dan dibuang dengan benar. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung pengurangan sampah. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Dengan larangan ini, masyarakat akan terdorong untuk beralih ke alternatif yang ramah lingkungan, seperti tas belanja kain atau botol minum yang dapat diisi ulang. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan pajak atau denda bagi perusahaan yang menggunakan bahan kemasan berlebihan atau tidak ramah lingkungan. Pemerintah Kota Ambon juga dapat memperkuat program daur ulang dan pengolahan sampah. Mereka dapat membangun lebih banyak fasilitas daur ulang di berbagai wilayah kota Ambon dan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah yang ada. Dengan demikian, sampah non-organik dapat diolah menjadi bahan baku kembali atau dikonversi menjadi energi melalui teknologi yang sesuai.

Wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut: wawancara penelitian dengan Bpk J, ibu H.T, ibu R.N:

“Kebijakan sudah sampai dilingkup terkecil dikota Ambon makanya Dinas melibatkan itu dan kedepannya ada pelimpahan kewenangan misalnya Kecamatan dia lihat masing-masing Desa, Negeri yang nanti bertanggung jawab dengan tiap-tiap sampah mereka dan di Makasar saja Perda sudah turun 5-10 tahun baru bisa menepatkan pelimpahan itu apalagi kota Ambon, pelimpahan kewenangan itu misalnya kita punya armada ini kita harus membagi armada itu ke lima kecamatan ini dengan desa yang ada dan itu mereka nanti yang mengelola mereka punya sampah dan setiap Desa, Negeri, Kelurahan harus punya 1 bank sampah. nanti kedepan kita yang dinas tidak tangani dan smuanya itu ada pada pelimpahan kewenangan ke semua Desa jadi Desa yang bertanggung jawab dengan sampah masing-masing karena desa punya Bumdes dan bank sampah bisa masuk disitu dan bisa lakukan daur ulang yang mandiri di masing-masing, Desa bisa mengelola uang disitu. di Makasar penyesuaian itu 5-10 tahun baru bisa jalan dan kita sementara dengan kondisi seperti ini makanya kita bersyukur MJO bisa masuk, program-program itu bisa masuk, kita tidak ada pemikiran bahwa harus ada pelimpahan kewenangan tapi kita diberikan pencerahan untuk bisa jalakan itu kedepannya”.

Pemerintah Kota Ambon juga dapat memperkuat program daur ulang dan pengolahan sampah. Mereka dapat membangun lebih banyak fasilitas daur ulang di berbagai wilayah kota dan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah yang ada. Dengan demikian, sampah non-organik dapat diolah menjadi bahan baku kembali atau dikonversi menjadi bahan yang berguna dan layak pakai. Pemerintah juga dapat mendorong dan mendukung inisiatif swasta atau komunitas-komunitas yang bergerak dalam bidang pengolahan sampah. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah yang ada dikota Ambon bahkan pemerintah dapat melibatkan pihak-pihak lain dalam penangan sampah di Kota Ambon.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan sampah di Kota Ambon. Sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pemerintah bertugas untuk menciptakan kebijakan dan mengatur sistem penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu peran utama pemerintah adalah menciptakan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah dengan baik. Pemerintah dapat mengadakan kampanye dan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang segregasi sampah, pengurangan sampah plastik, serta pentingnya daur ulang dan pengelolaan limbah yang benar.

Selain itu, pemerintah juga harus mengatur sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang efisien. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah di Kota Ambon. Melalui peraturan dan regulasi yang ketat, mereka dapat memastikan bahwa perusahaan dan individu yang terlibat dalam penanganan sampah benar-benar mematuhi aturan dan melaksanakan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanganan sampah. Misalnya, memberikan insentif pajak atau bantuan finansial kepada perusahaan atau individu yang melakukan daur ulang atau mengurangi produksi sampah. Dengan peran yang kuat dari pemerintah, diharapkan penanganan sampah di Kota Ambon dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

2. Peran Komunitas

Komunitas kota Ambon memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan sampah. Mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu peran penting komunitas kota Ambon adalah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar. Mereka mengadakan kampanye kesadaran lingkungan dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengajarkan anak-anak betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas yang ada di Kota Ambon. Komunitas kota Ambon juga aktif dalam mengorganisir kegiatan pembersihan kolektif. Mereka mengumpulkan sukarelawan untuk membersihkan area-area publik, seperti pantai, taman, atau jalan-jalan, untuk mengumpulkan sampah yang berserakan. Ini adalah cara yang efektif untuk mengatasi masalah sampah bersama-sama. Selain itu, komunitas kota Ambon juga terlibat dalam mengembangkan solusi kreatif untuk mengurangi sampah. Mereka mendorong penggunaan kembali dan daur ulang, serta mengadakan lokakarya tentang kreasi dari barang bekas. Dengan demikian, mereka berusaha mengurangi jumlah sampah yang akhirnya mencapai tempat pembuangan akhir. Wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut : wawancara penelitian dengan Bpk J dan ibu V, ibu O

“Sampah ini sebenarnya peluang bisnis, dari Green Moluccas sendiri pernah buat kerajinan tangan pada event yang kemudian diapresiasi oleh mantan walikota dengan harga 1 juta lebih namun untuk ide kreatif yang dilakukan sangat bernilai dan tidak terhingga selain itu ada juga sosialisasi, workshop pelatihan tentang pengelolaan sampah dan ini pernah dari klasis Ambon Pulau. Kita juga Cerita lingkungan dengan pro 2 RRI beberapa kali kita lakukan selain itun juga kita menjadi Enumerator program kampung iklim dari kementerian kehutanan dan lingkungan hidup danada juga proklam program kampung iklim Negeri Passo. Negeri passo ikut kampung iklim yang scope nasional masuk provinsi.

Ada juga Ekobrik yang di dalamnya itu sampah-sampah tidak bernilai contohnya nutrisari, bungkus makanan yang mengandung aluminium foil jadi tidak terbuat dari plastik makanya tidak bernilai, semua jenis plastik itu bernilai tapi yang mengandung aluminium foil tidak bernilai makanya di manfaatkan untuk buat kursi ekobrik dan semua hasil karya akan di tampilkan pada momen-momen pameran contohnya smartmarket di pattimura park tahun 2019 yang kemudian impact itu banyak terjadi di kota ambon khusus yang beragama Kristen pada sekolah minggu meniru ekobrik untuk dipelajari anak-anak sekolah minggu. Yang kemudian diapresiasi oleh mantan walikota untuk ide kreatif karena Green Moluccas sering sumbang adipura-adipura kebersihan untuk kota Ambon. PT Mla disini sebagai recovery punya beberapa mitra yang kerja sama yang supply sampah ada beberapa titik yang kerja sama kalau sekitar sini ada Hukurila, Passo, Nania, Hattu pokoknya kerjanya cari sampah lalu supply ke sini tapi sampah yang sudah dipilah. The mulung sendiri sudah banyak melakukan aksi mulung bahkan aksi jaga iklim.

Jadi, komunitas kota Ambon berperan sebagai agen perubahan yang berupaya keras untuk mengatasi masalah sampah. Dengan kolaborasi dan inisiatif mereka, mereka menginspirasi masyarakat setempat untuk ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan bahkan menjadi sampah sebagai sesuatu yang bernilai dan mempunyai nilai ekonomis. Komunitas juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Mereka berperan dalam mengajukan usulan, memberikan masukan, dan membantu dalam implementasi program- program penanganan sampah yang berkelanjutan. Dalam hal ini, komunitas menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon. Tidak hanya berperan di tingkat lokal, beberapa komunitas juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang inovatif. Mereka mencari solusi alternatif, seperti daur ulang kreatif atau penggunaan energi terbarukan dalam proses pengelolaan sampah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Ambon.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan sampah di Kota Ambon. Dengan partisipasi aktif dan kesadaran mereka, penanganan sampah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat seharusnya dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik merupakan salah satu penyebab utama masalah sampah di Kota Ambon. Dengan memilih alternatif yang ramah lingkungan, seperti membawa tas belanja sendiri atau menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang, masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Selanjutnya, masyarakat juga dapat memisahkan sampah organik dan non-organik di rumah sebelum dibuang. Dengan memilah sampah sejak awal, proses pengolahan sampah dapat menjadi lebih efisien. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang berguna untuk pertanian, sedangkan sampah non-organik dapat diarahkan ke fasilitas daur ulang. Wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut : wawancara penelitian dengan Bpk J dan Bpk H, ibu W, Bpk R.S

“kita masyarakat ini sangat mendukung program-program peningkatan kebersihan kota Ambon baik itu dari pemerintah tapi juga ada komunitas-komunitas lakukan, kita sering berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan kampanye kebersihan bahkan juga kalau ada kegiatan lain kaya proses sampah bisa menjadi bahan jadi pakai karena kita sadar ini sangat

membantu mengurangi jumlah sampah yang terbuang sembarangan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat tapi juga kita menginginkan fasilitas daur ulang yang lebih mudah kita jangkau tapi kita masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari bahaya sampah, kita masih bakar sampah di halaman rumah, masih buang sampah di aliran air kali dan lain-lain. Memang betul sampah dulunya di masyarakat hanya dibuang dan dibakar tapi sekarang sudah bernilai ekonomi jadi ada manfaatnya jadi sampah mau buat kerajinan juga bisa, jual juga bisa untuk income ekonomi juga bisa contohnya kita jual sampah di bank sampah Green Moluccas”.

Masyarakat juga dapat berperan dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar. Menggunakan metode daur ulang di rumah, seperti menanam kompos atau menggunakan sistem daur ulang air, dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang. Selain itu, mengadakan kegiatan seperti gotong royong pembersihan lingkungan atau kampanye lingkungan di lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah yang baik. Masyarakat juga dapat mengikuti program pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Ambon. Melalui program ini, masyarakat dapat mempelajari metode pengelolaan sampah yang efektif dan mendapatkan akses ke fasilitas pengolahan sampah yang ada. Dalam program ini, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Penerapan kebijakan pemerintah dalam manajemen penanganan sampah di Kota Ambon, dapat disimpulkan yakni:

Implementasi kebijakan dalam penanganan sampah di Kota Ambon telah mencapai pencapaian yang cukup baik. Dari belakangan ini, pemerintah Kota telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di kota ini. Kebijakan Melalui kampanye edukasi, Program daur ulang sampah juga telah berhasil diimplementasikan dengan cukup baik. Pemerintah Kota bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah/ komunitas-komunitas dan masyarakat dalam menciptakan fasilitas daur ulang yang efektif dan efisien. Ini telah mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta memberikan peluang ekonomi baru dalam industri daur ulang. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada upaya edukasi, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan dan penanganan sampah yang baik.

Faktor Komunikasi cukup efektif antara pemerintah kota dan masyarakat tapi juga komunitas menjadi faktor kunci dalam kesuksesan penanganan sampah. Melalui kampanye komunikasi yang luas dan melibatkan media sosial bahkan juga aksi-aksi, sosialisasi yang dibagikan untuk di edukasi bagi semua pihak menjadikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan bahkan juga penanganan sampah dapat ditingkatkan untuk hidup yang berkelanjutan. Faktor Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya hampir memadai seperti personel, anggaran, dan infrastruktur.

Peran pemerintah, masyarakat, dan komunitas sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Pemerintah kota Ambon memiliki peran utama dalam memberikan kebijakan dan mengelola infrastruktur yang diperlukan untuk

penanganan sampah. Melalui alokasi sumber daya yang memadai, seperti personel, anggaran, dan fasilitas pengelolaan sampah, pemerintah telah cukup mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Namun, peran masyarakat juga sangat penting dalam penanganan sampah. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan sampah di Kota Ambon.

Melalui kampanye komunikasi yang luas, partisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, dan penggunaan media sosial sebagai alat untuk berbagi informasi, sebagian masyarakat Ambon telah menunjukkan komitmen mereka terhadap perubahan positif dalam penanganan sampah namun masih banyak masyarakat Kota Ambon yang belum mendisiplinkan diri dalam menciptakan sampah tetapi juga cara penanganan pengelolaan sampah yang ada disekitar. Selain itu, komunitas-komunitas lokal yang ada di Kota Ambon juga berperan penting dalam menggalang dukungan dan menginspirasi perubahan. Melalui kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat, komunitas telah memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang inovatif dan lain-lain. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas, penanganan sampah di Kota Ambon dapat mencapai kemajuan yang cukup signifikan karena suatu keberhasilan menunjukkan betapa pentingnya kerjasama lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamimi, F., Madubun, J., & Khairunnisa, A. (2024). Strategi Dinas Parawisata Provinsi Maluku Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 22-34.
- Arbi, M. K. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, I. H., Sari, A. R., & Salim, T. (2018). *Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Ambon*. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call for Paper: The Role of Sciences and Technology Toward Sustainable Development Goals (SDGs), 2(1), 109-119.
- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. (2020). *Kota Ambon dalam angka 2020*. Ambon: Badan Pusat Statistik Kota Ambon.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman teknis pengelolaan sampah kota*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Herizal, H., Mukhril, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Kuncoro, M. (2016). *Strategi Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestiawan, H., & Meirina, F. (2017). Evaluasi program pengelolaan sampah di Kota Ambon. *Jurnal Insan Cendekia BKM*, 2(1), 39-46
- Muharram, H., & Rusdiana, F. (2018). Penerapan e-government dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 17(2), 181-187
- Nasution, M. (2019). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sari, S. A., & Sujarwo, T. (2019). Analisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di

- Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 27(1), 31- 38.
- Salman, S., Arifin, Z., & Hasdinawati, H. (2023). Efektivitas Sistem Transaksi Non Tunai dalam Layanan Parawisata di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Science Studies*, 2(1), 45-50.
- Siregar, S. S., & Kusumah, A. (2020). Analisis kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 41-49.
- Siswanto, A. (2017). Dampak lingkungan pencemaran sampah pada kota Ambon. *Jurnal Perspektif Ilmu Lingkungan*, 9(2), 199-207
- Suparman, R. (2017). *Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Senen, K. (2023). Masalah Sampah Dan Pariwisata Papua Barat Daya. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 71-77.
- Taher, N. M. (2017). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di beberapa kota besar di Indonesia. *Jurnal Politik*, 7(1), 1-13.
- Tim Penyusun Perda kota ambon. (2019). *Peraturan daerah kota ambon nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah*. Ambon: Pemerintah Kota Ambon.
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.